

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KAMPUNG KB
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Mohammad Adhitya Andhika

NPP. 29.0415

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Fakultas Perlindungan Masyarakat*

Email: adhityaandhika13@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research was conducted at the Office of Population Control and Family Planning in Palembang City. As for the formulation of the problem in this study, namely how is the role of the Population Control and Family Planning Service in implementing the Kampung KB program in Palembang City, what are the factors that influence the implementation of the village family planning program in the city of Palembang, and how are the efforts of the Population Control and Family Planning Service to optimizing the Kampung KB program in Palembang City. **Purpose:** The target of the Population Control and Family Planning Agency is the realization of stable population growth and the creation of quality families in the city of Palembang in order to avoid overcrowding with limited number of jobs and pay attention to the health of fertile age couples (PUS) and the growth and development of children born. **Method:** In this study, the researcher will use a qualitative descriptive research method with an inductive approach. This method was chosen aiming to describe the conditions that actually occur in the field or the research environment that will be the object of research. **Result:** The results of the study indicate that the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection has played an optimal role. However, there are several obstacles that must be overcome, such as a shortage of personnel, facilities to support service mobilization and a cut program budget for handling COVID-19. In connection with this, the efforts made to overcome obstacles include the implementation of family planning development on a priority scale, Refreshing Family Planning Cadre Activities with health protocol guidelines and coordinating synergistically regarding the need for operational infrastructure for family planning services. **Conclusion/sugegestion:** The role of the Population Control and Family Planning Service in implementing the KB Village Program is still running effectively where it is noted that active family planning participants with a population of childbearing age reached an active percentage of 29.4% and also development in KB Villages continues to develop such as the existence of independent SMEs from KB Villages. itself to support the improvement of the regional econom

Keywords: *Role, Family Planning Village, Family Welfare*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program Kampung KB di Kota Palembang, Apa saja faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program kampung kb di kota palembang, serta Bagaimana upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan program Kampung KB di Kota Palembang. **Tujuan:** Adapun target daripada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu terwujudnya pertumbuhan penduduk yang stabil dan terciptanya keluarga yang berkualitas di Kota Palembang guna menghindari kepadatan penduduk dengan keterbatasan jumlah lapangan kerja serta memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. **Metode:** Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan ataupun lingkungan penelitian yang akan menjadi objek penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berperan secara optimal. Namun terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti kekurangan personil, fasilitas penunjang mobilisasi layanan dan anggaran program yang terpengkas untuk penanganan COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan meliputi penyelenggaraan pembinaan KB dengan skala prioritas, Kegiatan Refreshing Kader KB dengan pedoman protokol kesehatan dan berkoordinasi secara sinergis terkait kebutuhan sarana prasarana operasional pelayanan KB. **Kesimpulan dan Saran:** Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung KB tetap berjalan efektif dimana tercatat bahwa peserta KB aktif dengan Penduduk Usia Subur mencapai persentase keaktifan mencapai 29,4% dan juga pembangunan yang ada di Kampung KB terus berkembang seperti adanya UMKM mandiri dari Kampung KB itu sendiri untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah tersebut

Kata Kunci: Peranan, Kampung KB, Kesejahteraan keluarga.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dimasa pandemi ini dapat dikatakan tinggi dan menjadi persoalan fundamental bagi seluruh negara di dunia. Hal tersebut selaras dengan Kependudukan Indonesia yang berada pada poin utama prioritas pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Data Kependudukan dari Kemendagri mencatat jumlah penduduk semester dua 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,7 juta jiwa yang tercatat

dalam tempo waktu selama enam bulan. Jumlah penduduk Indonesia yang telah dikalkulasikan dengan hasil sensus penduduk BPS sejumlah 271.349.889 jiwa dengan populasi penduduk pria sebanyak 137,11 juta jiwa dan populasi perempuan mencapai 134,22 juta. Dalam jenjang waktu sepuluh tahun terakhir tercatat dari (2010-2020), penambahan penduduk rata-rata 3,26 juta setiap tahunnya atau dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahunnya. Pada bulan Januari tahun 2016 Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan program yang diselenggarakan di suatu kampung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus membangun sektor lain. Program ini juga digunakan sebagai kegiatan pembangunan keluarga yang baik dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas diartikan sebagai Satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setingkat, dan memiliki kriteria dimana terjadinya keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dibuat secara sistematis. Program ini dilaksanakan untuk upaya merealisasikan fungsi keluarga secara nyata dalam masyarakat. Adapun program ini nantinya digunakan untuk sosialisasi dalam penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi serta menjadi program pembangunan yang terstruktur dengan berbagai macam program pembangunan sektor lainnya. Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang membantu menyelesaikan program Keluarga Berencana dengan adanya program kampung KB, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Saat ini Kota yang terkenal dengan kota Pempek ini telah memiliki Kampung KB yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini merupakan suatu program untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di kota Palembang dan juga bertujuan untuk menciptakan kota Palembang yang memiliki keluarga sehat, baik, berkualitas dan terencana. Selaras dengan program Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditugaskan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang Untuk mewujudkan hal itu tentunya diperlukan kerjasama yang baik dengan pejabat setempat pada tingkat Camat hingga kelurahan. Sehingga nantinya dapat terciptanya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan program Kampung KB tersebut guna menekan laju pertumbuhan penduduk di kota Palembang dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang. Diharapkan program Kampung KB ini dapat menggairahkan masyarakat tentang Program Keluarga Berencana adapun yang dimaksudkan ialah guna membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan ekonomi keluarga tersebut, menekan angka kematian ibu dan anak akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua akibat penyakit sistem reproduksi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Palembang terdapat 17 Kampung KB yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Palembang dan sudah terdaftar dalam Kampung KB BKKBN pada tahun 2018. Dari data tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dilapangan diantaranya ialah Fasilitas operasional dalam pelayanan kegiatan KKBPK kepada masyarakat yang masih belum memadai, Sumber daya manusia yang masih belum merata dan juga belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi untuk melaksanakan Program Kampung KB. Peneliti mendapati di lapangan bahawasanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program Kampung KB masih terhambat dimana kurangnya dari segi operasional berupa mobil yang

ada dengan jumlah faskes di Kota Palembang. Mobil di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri terdapat empat mobil yang beroperasi sedangkan jumlah faskes yang ada untuk menjalankan program KB sejumlah 128 fasilitas kesehatan yang terbagi antara lain pada rumah sakit, dokter praktek, puskesmas maupun bidan di Kota Palembang dengan jumlah personil yang turun ke lapangan sebanyak lima tim dimana masing tim terbagi atas tiga personil sebagai upaya untuk menyukseskan program tersebut untuk mengendalikan laju pertumbuhan dan menciptakan keluarga yang sehat, baik, berkualitas dan terencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama yaitu Shania Fahria Rysudu(2018) Hasil dari penelitian yang berjudul tentang “Koordinasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia” pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Program Kampung KB merupakan program yang membutuhkan koordinasi dari berbagai lembaga karena kampung KB bukan hanya untuk pengendalian penduduk saja melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Namun di kecamatan Sari Rejo masih belum optimal dikarenakan masih ada lembaga yang belum melakukan peran yang diharapkan mengatasi masalah baik dari segi koordinasi maupun pokja kampung KB Sari Rejo. Peneliti yang kedua yaitu Hasil Penelitian dari Ferawati (2018) Hasil dari penelitian yang berjudul tentang “Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan” Pada karya ilmiah ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Ada beberapa kendala yang dihadapi baik itu BKKBN ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan. Anggaran APBD yang harganya jauh lebih murah dari dana APBN, lebih lanjut dikatakan bahwa kendala-kendala lain berupa proses pembinaan di mana letak desa-desa yang memenuhi syarat dibentuknya kampung KB itu sangat sehingga transportasi lebih mahal dan belum lagi jalan dan jembatan yang belum terbentuk sempurna sehingga menghambat proses pembinaan kampung kb itu sendiri. Untuk permasalahan yang ada di lingkup masyarakat belum dirasakan dikarenakan masih menyesuaikan pembenahan program Kampung KB ini. Dan peneliti yang ketiga yaitu Hasil Penelitian dari Nur Asia Aprika (2019) Hasil penelitian yang berjudul tentang “Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyukseskan Bidang Program Keluarga Berencana”. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa DPPKBP3A sangat berperan dalam melaksanakan kegiatan berbau pemerintah khususnya di bidang keluarga berencana untuk mengendalikan penduduk dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan beberapa pendekatan dimana bidang KB ini 12 memiliki fungsi untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan

mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB DI Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Ada tiga jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan campuran. Dalam melakukan penelitian peneliti harus mempunyai keterampilan dalam mengamati, melihat, dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan ataupun lingkungan penelitian yang akan menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2013:9) dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, mengatakan bahwa Suatu penelitian kualitatif merupakan salah satu cara yang dilandasi oleh filsafat postpositivisme yang berguna untuk memahami kondisi alamiah objek penelitian, dimana yang menjadi kunci dari instrumen adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), dan pendekatan secara induktif dimana hasilnya nanti akan menggambarkan maksud dari penelitian yang diteliti. Pendapat menurut Cannole dkk dalam buku Muh. Fitrah & Luthfiah (2017:44) menjelaskan arti penelitian kualitatif adalah memfokuskan pengumpulan data yang bisa berupa dokumen ataupun data penunjang lainnya yang dikaji lebih mendalam untuk mengetahui gejala yang terjadi serta karakteristik umum seorang individu maupun kelompok dalam masyarakat tentang kejadian yang telah dialami. Beberapa penjelasan para ahli mengenai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dipilih akan disesuaikan dengan jawaban yang diharapkan dari rumusan masalah mengenai Peran DPPKB dalam melaksanakan program Kampung KB di Kota Palembang, maka peneliti perlu mencari data yang dapat ditafsirkan menjadi analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang.

Program Kampung KB adalah program Pemerintah Kota Palembang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Penelitian yang digunakan oleh dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang disesuaikan dengan teori yang ada dalam Skripsi ini. Teori yang akan diteliti yaitu Teori Peranan Soerjono Soekanto tahun 2017 yang peneliti sudah rumuskan dalam operasional konsep yang ada pada tabel 3.1 skripsi ini. Peneliti juga akan menampilkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada Ada 3 (tiga) dimensi yang akan dianalisis, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan (Status) 2. Kekuasaan (Power) 3. Wewenang (Authority).

1. Kedudukan (*Status*)

Kedudukan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang tentang Tugas dan Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peneliti dalam hal mendapatkan informasi, peneliti mewawancarai Kepala Bidang Penyuluhan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana aspek kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada program Kampung KB. Peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana “awalnya program Kampung KB ini, susah diterima oleh masyarakat khususnya lorong yang ditunjuk oleh Dinas PP-KB untuk jadi Kampung KB. Sebab, dana untuk mengelola lingkungan swadaya dari masyarakat bukan dari Dinas PP-KB”. Hasil wawancara dari informan yang peneliti tentukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan oleh Dinas PP-KB baik kepada masyarakat, maupun kepada aparat kecamatan yang membantu Dinas PP-KB dalam menyelesaikan program Kampung KB, namun dalam hal ini sosialisasi belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik karena belum menyeluruh. Kampung KB Layang-layang saat ini menjadi salah satu Kampung KB percontohan Nasional yang mana Kampung KB ini sendiri memang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang diutamakan yaitu pada daerah pinggiran. Kampung KB layang-layang sendiri sudah memiliki beberapa UMKM yang dapat di perjual-belikan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat diantaranya pembuatan layang-layang, peternakan budidaya ikan lele, dan rumah produksi jahe”. Adapun Peranan yang signifikan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menekan angka kelahiran di Kota Palembang

2. Kekuasaan (*Power*)

Kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak yang memegang kekuasaan Untuk mencapai suatu kekuasaan maka seseorang atau organisasi harus memiliki legalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penguasa di bidangnya. Hal yang paling krusial dalam menegakkan aturan yaitu sumber daya yang ada dalam dinas pun sudah semestinya untuk ikut dalam aturan yang berlaku. Sumber daya yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemerintah Kota Palembang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), SDA, dan Sumber Daya Peralatan belum memadai. Kekuasaan yang dilimpahkan kepada suatu lembaga tidak terlepas pula oleh pimpinan lembaga organisasi tersebut. Kualitas kepemimpinan dari kepala atau pimpinan lembaga organisasi sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu lembaga. Kekuasaan tidak dapat ditolerir dan di tawar oleh siapapun dengan berbagai alasan apapun dikarenakan terdapat peraturan yang mendasari dan termuat didalam kekuasaan. Pada dasarnya kekuasaan selalu dilandasi dengan dasar hukum yang kuat sehingga kekuasaan

tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peran yang ada.

3. Wewenang (*Authority*)

Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adapun program yang dilaksanakan yaitu program Kampung KB yang pada dimensi ini terbagi menjadi dua indikator untuk terpenuhinya wewenang dari Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang:

a. Inovasi.

Inovasi merupakan sebuah gagasan kegiatan yang mengandung manfaat dan dapat diterima baik bagi masyarakat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang ada di Kampung KB itu sendiri atas dasar peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berhasil menggagas Kampung KB Layang-layang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta menambah angka pasangan BerKB sehingga dapat menekan lajunya pertumbuhan penduduk di Kota Palembang Peserta KB yang aktif dari tiap bulannya selalu berubah ubah seiring 62 dengan adanya perubahan dinamika kependudukan yang ada di Kota Palembang maupun peserta KB yang memilih untuk berhenti. Kepadatan penduduk masih menjadi tugas yang harus diselesaikan bersama sebagai seorang pemerintahan agar menghindari terjadi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah Kota Palembang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program Kampung KB.

b. Koordinasi.

Koordinasi merupakan hubungan timbal balik yang tersinkronisasi terhadap kegiatan apa yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama pada program Kampung KB tentang responsif masyarakat terkait program tersebut serta upaya-upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program Kampung KB di Kota Palembang seiring dengan banyaknya hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Koordinasi merupakan hubungan timbal balik yang tersinkronisasi terhadap kegiatan apa yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama pada program Kampung KB tentang responsif masyarakat terkait program tersebut serta upaya-upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program Kampung KB di Kota Palembang seiring dengan banyaknya hambatan-hambatan yang ada di lapangan Keluarga Berencana antara lain membagikan alat kontrasepsi untuk menunda masa kehamilan ataupun mencegahnya.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Di Kota Palembang.

1. Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB

Kelengkapan unsur penyelenggara menjadikan pelayanan KB dapat beroperasi dengan lancar. Kecukupan jumlah pegawai dengan ruang lingkup wilayah kerja menjadi indikator terpenuhinya standar pelayanan KB yang optimal. Apabila suatu layanan terlaksana dengan durasi waktu yang lama maka kekurangan personil dapat berpotensi menjadi salah satu penyebabnya. Sekaitan dengan hal tersebut peneliti berfokus kepada kecukupan personil penyuluh KB berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang terdapat dalam satu kecamatan. Fungsi koordinasi kurang tercapai karena jumlah petugas dibawah standar yang berlaku. Akibatnya, pelayanan KB cukup terhambat. Berdasarkan data di atas, pembinaan KB tidak berjalan maksimal bila berpedoman pada standar minimal 1 petugas membina 2 Kampung. Walaupun dapat di atasi dan ditangani secara bersama, kekurangan personil hendaknya menjadi perhatian oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mendelegasikan perannya agar terselenggara dengan baik dan mendapat perhatian lebih agar perkembangan Kampung KB itu sendiri lebih maksimal

2. Terjadinya Refocussing Anggaran

Akibat terjadinya pandemi yang melanda pada tahun 2020 maka sebagian anggaran yang dianggarkan untuk pengurus PKB dan juga terkait pembelian alat-alat kontrasepsi justru dialihkan untuk peralatan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran viru covid-19.

3. Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB belum difasilitasi secara maksimal

Mobilisasi merupakan hal yang umum diterapkan bagi setiap pelayanan langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi penyelenggaraan kegiatan memperhatikan keberadaan infrastruktur daalm mendukung tercapainya program. Apabila keberadaan fasilitas yang relevan dengan kepentingan pelayanan belum lengkap maka standar pelayanan pun belum mampu mencapai kepuasan masyarakat. Analisis hambatan ini berkonsentrasi pada ketersediaan transportasi sebagai sarana mobilitas layanan KB di lapangan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Peneliti juga mengamati dukungan kendaraan khusus dari Dinas-PPKB untuk memfasilitasi pergerakan pelayanan Kontrasepsi wilayah kecamatan.

3.3. Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan.

Respon organisasi dalam menyikapi suatu fenomena atau gejala yang muncul pada program dan kegiatan dapat berupa upaya organisasi. Hal ini merupakan perwujudan penanggulangan masalah yang terjadi supaya setiap tujuan dapat dicapai tanpa gangguan dari hambatan itu sendiri. Sekaitan dengan hal tersebut, DPPKB Kota Palembang menanggulangi berbagai hambatan tersebut dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan Skala Prioritas pada Pembinaan KB

Hambatan terkait kekurangan personil Pembina sosialisasi KB menjadi bahan kajian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Penambahan personil sekilas menjadi opsi yang solutif untuk memenuhi standar perbandingan jumlah PKB dan PLKB terhadap jumlah Kampung yang dibina. Namun hal ini menjadi tidak tepat sasaran mengingat refocussing anggaran telah memangkas seluruh dana demi kepentingan penanganan Covid-19. Menambah jumlah personil berarti juga menambah jumlah dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan pegawai tambahan tersebut. Keterbatasan anggaran menuntut Koordinator Balai Penyuluh untuk menemukan alternatif yang cocok dalam memenuhi kebutuhan PUS terhadap program KB saat pandemi lalu. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Kampung KB ini adalah pemerintah pusat memberikan dukungan yang besar dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BKKBN No. 163 Tahun 2016, sehingga setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dalam pengendalian penduduk dan merencanakan keluarganya. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan program Kampung KB ini sesuai dengan Peraturan Walikota bahwasanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menyediakan Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi secara gratis yang kemudian di distribusikan ke tiap kecamatan melalui puskesmasnya.

b. Refreshing kader KB untuk menambah pengetahuan

Refreshing Kader KB pada masa pandemi tidak hanya dilakukan untuk peningkatan kemampuan kader, namun memberikan penjelasan terhadap anggaran yang terpangkas akibat refocussing anggaran. Honorarium yang tidak teranggarkan pada tahun 2020 perlu dipahami karena penanganan Covid-19 perlu diprioritaskan. kegiatan Refreshing KB menjadi solusi keterbatasan 74 penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi KB oleh Dinas-PPKB. Pemahaman terkait pembekuan insentif sementara dapat dipahami dan semangat petugas dapat dipulihkan melalui sesi pemaparan dan motivasi pada acara Refreshing Kader KB.

c. Mengkoordinasikan terkait kendaraan Operasional dari Dinas

Pelayanan KB yang baik didukung oleh kelengkapan sarana mobilisasi yang memadai. Merujuk pada permasalahan terkait pelayanan Kb secara jemput bola dengan kendaraan pribadi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh dinas terkait. Solusi yang dapat diputuskan adalah melakukan koordinasi secara bersinergi dan berjenjang antara petugas pelaksana program KB sampai ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang untuk menganggarkan terkait Kendaraan operasional khusus untuk pelayanan KB. Kelengkapan sarana prasarana merupakan tanggungjawab Dinas untuk menyediakan sarpras pelayanan KB demi menunjang jalannya pelayanan KB kepada masyarakat untuk terciptanya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kumuh dan padat penduduk seperti Kampung KB Layang-layang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dalam rangka untuk mengendalikan penduduk di Kota Palembang dengan membuat program keluarga berencana, dimana salah satu program Dinas Pengendalian Penduduk ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di Kota Palembang. Salah satu program Dari Dinas Pengendalian Penduduk Kota Palembang ialah membuat program kampung KB, dimana program ini berguna untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Dalam menanggapi Program Pemerintah Mengenai Kampung KB, masyarakat sangat antusias untuk dapat memaksimalkan dengan melakukan swadaya kegiatan pembangunan di wilayah tersebut yang semulanya kumuh dan kini menjadi pemukiman berwarna dan untuk layak di huni. Dinas Pengendalian Penduduk mempunyai wewenang untuk dapat membuat dan mengambil keputusan dalam upaya untuk mengendalikan penduduk dan mensejahterahkan warga Kota Palembang. Sehingga peningkatan penduduk di kota Palembang dapat terkontrol dan masyarakatnya sejahtera dengan di berikannya bantuan dari pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kampung KB tetap berjalan efektif dimana tercatat bahwa peserta KB aktif dengan Penduduk Usia Subur mencapai persentase keaktifan mencapai 29,4% dan juga pembangunan yang ada di Kampung KB terus berkembang seperti adanya UMKM mandiri dari Kampung KB itu sendiri untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah tersebut. Kegiatan-kegiatan yang menjadi peranan daripada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana diantaranya yaitu melakukan Penyuluhan KB, Pemberian Alat kontrasepsi secara gratis kepada tiap-tiap kecamatan dan juga ikut serta pembangunan keluarga melalui Kampung KB yang merupakan daerah kumuh dan padat penduduk menjadi daerah yang layak ditempati membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor yang memengaruhi

Faktor-faktor yang mendukung untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kampung KB justru masih terjadi hambatan dalam pelayanan Kampung KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang berupa :

- a. Fasilitas Fasilitas yang masih kurang membuat pelayanan Kampung KB menjadi sedikit terhambat dan menimbulkan rasa tidak puas masyarakat. Perlunya penambahan sarana dan prasana pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Palembang seperti kendaraan penyuluh KB serta penyegaran alat kontrasepsi baru untuk tahun mendatang

- b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang masih kurang terutama disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai yang ada sehingga pembagian kerja menjadi tidak merata dan dibebankan kepada penyuluh KB. Disisi lain mengakibatkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang masih memiliki hasrat untuk nikah muda sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait kegiatan berKB masih belum merata untuk menekan angka kelahiran dan memantau kemajuan daripada Kampung KB yang tersebar di tiap kecamatan di Kota Palembang.

3. Peranan dalam mengatasi permasalahan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Selain itu di upayakan adanya pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang proses penyuluhan KB seperti akan diadakan seminar maka haruslah memanfaatkan sarana prasana yang ada seperti: Kendaraan, soundsystem, microphone serta proyektor.
- b. Sumber Daya Manusia
 - Meningkatkan kualitas pegawai dengan sebaik mungkin.
 - Memberikan pelatihan dan arahan mengenai Keluarga Berencana dan Inovasi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
 - Menjalankan pengawasan rutin terhadap kegiatan yang ada di Kampung KB.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Di Kota Palembang.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Di Kota Palembang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(DPPKB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul, A. S. 2009. *Evaluasi Program Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimbi Heroesputri, M. A. 1994. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALIH) .
- Luthfiah, M. F. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mantra, I. B. 2020. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rusidi, S. F. 2018. *Koordinasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sari Rejo kecamatan Medan Polonia*.
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supomo, N. I. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Tjokroamidjojo, B. 1980. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Jurnal – jurnal dan Skripsi

- Rusidi, Shania Fahira. 2018. *Koordinasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia*. Medan Polonia: Universitas Sumatera Utara

Ferawati. 2018. *Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan*. Bulungan: Universitas Kaltara.

Endah, Kiki dan Windu A. Khaliq. 2019. *Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPBP3A) dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera*. Jurnal MODERAT Vol. 5 No. 2

Febriani, Dewi. 2020. *Upaya Pemerintah dalam mengendalikan Pertumbuhan Penduduk*. Jambi: Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin.

Lain-lain

<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn> diakses pada 28 agustus 2021 pukul 16.15 WITA

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/about> diakses pada 29 Agustus 2021 pukul 11.09 WITA

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/list?q=palembang> diakses pada 29Agustus 2021 pukul 11.19

